

# EKSTRAKSI, KERJA PERAWATAN, DAN INVISIBILITAS GENDER: KAJIAN FEMINIS INTERSEKSIONAL ATAS PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Juliana Bulan Pertiwi<sup>1</sup>, Ahmad Ridwan<sup>2</sup>, Dewien Nabelah Agustin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas  
Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: [24040564058@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040564058@mhs.unesa.ac.id)

## **Abstract:**

*Exploitation and gender inequality against women occur not only in conventional industrial sectors but also in everyday environmental management practices, such as waste management. From an intersectional feminist perspective, waste management can be understood as a non-material extractive industrial practice that relies on women's care work. This work is normalized as domestic responsibility, not recognized as productive work, and often overlooked by social protection. This study aims to analyze how waste management reproduces exploitation, gender invisibility, and unequal power relations for women. This study uses a qualitative approach with a phenomenological perspective. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and observations, with women who have direct experience in daily waste management practices as subjects. The number of informants in this study was three, with data collection carried out until sufficient information was obtained and no significant variations in new experiences were found. The results show that: (1) women's care work is the main foundation for the sustainability of the waste management system, yet it is normalized and not recognized socially or economically; (2) there is an imbalance in power relations between women as care workers and institutional actors as policy makers; and (3) women experience social and psychological impacts in the form of moral distress, emotional exhaustion, and social stigma. These findings indicate that waste management not only extracts material resources but also extracts women's time, energy, and social well-being. The novelty of this research lies in the analysis of waste management as an extractive industry through an intersectional feminist perspective with a phenomenological approach.*

**Keywords:** *intersectional feminism; care work; waste management; extractive industries; women.*

## **Abstrak:**

Eksplorasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam sektor industri konvensional, tetapi juga dalam praktik pengelolaan lingkungan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah. Dalam perspektif feminisme interseksional, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai praktik industri ekstraktif non-material yang bergantung pada kerja perawatan perempuan. Kerja ini dinormalisasi sebagai tanggung jawab domestik, tidak diakui sebagai kerja produktif, dan sering kali luput dari perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan sampah mereproduksi eksploitasi, invisibilitas gender, dan ketimpangan relasi kuasa terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, dengan subjek penelitian berupa perempuan yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, dengan penggalan data dilakukan hingga mencapai kecukupan informasi dan tidak ditemukan variasi pengalaman baru yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kerja perawatan perempuan menjadi fondasi utama keberlangsungan sistem pengelolaan sampah, namun dinormalisasi dan tidak diakui secara sosial maupun ekonomi; (2) terdapat ketimpangan relasi kuasa antara perempuan sebagai pelaksana kerja perawatan dan aktor institusional sebagai pengendali kebijakan; serta (3) perempuan mengalami dampak sosial dan psikologis berupa tekanan moral, kelelahan emosional, dan stigma sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mengekstraksi sumber daya material, tetapi juga mengekstraksi waktu, tenaga, dan kesejahteraan sosial perempuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada

analisis pengelolaan sampah sebagai industri ekstraktif melalui perspektif feminisme interseksional dengan pendekatan fenomenologi.

**Kata kunci:** feminisme interseksional; kerja perawatan; pengelolaan sampah; industri ekstraktif; perempuan.

## Pendahuluan

Dalam lima tahun terakhir, isu pengelolaan lingkungan dan limbah perkotaan semakin menguat dalam diskursus pembangunan, seiring dengan meningkatnya urbanisasi, krisis iklim, dan volume sampah yang terus bertambah. Sampah tidak lagi dipahami semata sebagai residu rumah tangga, tetapi mulai diposisikan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali dan diberi nilai ekonomi melalui berbagai skema pengelolaan modern. Pendekatan ini kerap dipresentasikan sebagai solusi rasional dan berkelanjutan. Namun, sebagaimana diingatkan Mohai et al. (2021) dan Pellow (2020), kebijakan lingkungan yang terlalu teknokratis sering kali mengabaikan dimensi keadilan sosial serta relasi kuasa yang bekerja di baliknya.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan modern justru dapat memproduksi ketimpangan baru, terutama bagi kelompok sosial yang berada pada posisi rentan. Nightingale (2020) dan Agarwal (2022) menegaskan bahwa banyak kebijakan lingkungan masih bersifat *gender-blind*, sehingga gagal menangkap pengalaman perempuan yang berbeda dari laki-laki. Dalam konteks pengelolaan sampah, perempuan memiliki peran yang sangat sentral, mulai dari pemilahan limbah rumah tangga, pengelolaan kebersihan domestik, hingga keterlibatan dalam kerja-kerja informal di sektor sampah. Namun, kontribusi ini jarang diakui sebagai kerja produktif dan kerap tidak tercatat dalam perhitungan ekonomi maupun kebijakan formal (Samson, 2021; Fredericks, 2021).

Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa perempuan mendominasi kerja-kerja informal dan tidak terlindungi dalam sektor lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, dengan tingkat risiko kesehatan dan ketidakamanan kerja yang relatif tinggi (Gill & Elias, 2021; Pellow, 2020). Dalam banyak konteks perkotaan, perempuan dari kelas sosial bawah menjadi penopang utama sistem pengelolaan limbah, baik sebagai pengelola domestik maupun pekerja informal, tetapi tidak memperoleh akses yang memadai terhadap perlindungan kesehatan dan pengakuan sosial (Nelles & Satterthwaite, 2020).

Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dipahami semata sebagai praktik teknis atau solusi ekologis. Pengelolaan sampah juga dapat dibaca sebagai praktik ekstraktif yang bergantung pada kerja perawatan perempuan. Kerja perawatan tersebut seperti menjaga kebersihan rumah tangga, mengelola limbah, serta merawat kesehatan keluarga yang terdampak lingkungan bersifat tidak dibayar, dinaturalisasi, dan dilekatkan sebagai tanggung jawab moral perempuan (Morrow & Dombroski, 2021; Weeks, 2021). Dalam konteks ini, ekstraksi tidak hanya terjadi pada sumber daya material, tetapi juga pada waktu, tenaga, dan tubuh perempuan.

Untuk memahami kompleksitas tersebut, teori feminisme interseksional menawarkan kerangka analitis yang relevan. Crenshaw (2021) menekankan bahwa ketidakadilan sosial tidak bekerja melalui satu kategori tunggal, melainkan melalui perpotongan berbagai struktur seperti gender, kelas, jenis pekerjaan, dan posisi sosial. Dalam sistem pengelolaan sampah, perempuan tidak hanya dimarginalkan karena gender, tetapi juga karena status kerja informal dan posisinya yang dilekatkan pada ranah domestik. Kondisi ini melahirkan invisibilitas gender yang bersifat struktural, di mana kontribusi perempuan menjadi prasyarat berjalannya sistem, tetapi tetap tidak terlihat dan tidak diakui (Lahiri-Dutt, 2022; Jenkins, 2020).

Studi-studi dalam lima tahun terakhir secara konsisten membahas relasi gender dalam industri ekstraktif dan sektor lingkungan, baik dalam konteks pertambangan (Jenkins, 2020; Lahiri-Dutt, 2022), kerja lingkungan dalam jaringan produksi global (Gill & Elias, 2021), maupun isu keadilan lingkungan perkotaan (Mohai et al., 2021; Pellow, 2020). Namun demikian, masih relatif

sedikit penelitian yang secara eksplisit memposisikan pengelolaan sampah sebagai industri ekstraktif yang bergantung pada kerja perawatan perempuan, serta menganalisisnya melalui perspektif feminisme interseksional. Akibatnya, pengalaman perempuan dalam sistem pengelolaan sampah sering kali tetap berada di pinggir analisis dan lebih banyak dibaca sebagai persoalan domestik semata.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah sebagai praktik industri ekstraktif yang mereproduksi ketimpangan gender melalui eksploitasi kerja perawatan perempuan. Dengan menggunakan perspektif feminisme interseksional dan pendekatan kualitatif fenomenologi, artikel ini berupaya memahami bagaimana perempuan mengalami, memaknai, dan menjalani kerja perawatan dalam sistem pengelolaan sampah sehari-hari. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menempatkan pengalaman hidup (*lived experience*) perempuan sebagai pusat analisis, sehingga praktik ekstraksi tidak hanya dibaca sebagai struktur kebijakan atau sistem ekonomi, tetapi juga sebagai realitas yang hadir dalam tubuh, waktu, dan kehidupan sehari-hari perempuan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya mengungkap bagaimana relasi gender, kelas, dan kebijakan lingkungan berkelindan dalam menciptakan invisibilitas kerja perempuan serta memindahkan biaya sosial dan ekologis pembangunan ke pengalaman hidup mereka.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fenomenologi, karena berfokus pada pengalaman hidup (*lived experience*) perempuan dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami bagaimana perempuan memaknai kerja perawatan, risiko lingkungan, dan posisi mereka dalam sistem pengelolaan sampah, dengan menanggukuhkan asumsi pribadi peneliti agar pengalaman informan dapat dipahami secara utuh. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitik, dengan tujuan mengkaji keterkaitan antara pengalaman perempuan dan struktur sosial yang membentuk invisibilitas gender, ketimpangan kerja, serta praktik ekstraksi dalam pengelolaan sampah. Analisis tidak hanya melihat pengalaman individual, tetapi juga relasi gender dan kelas yang melatarbelakanginya.

Kerangka teori yang digunakan adalah feminisme interseksional sebagaimana diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw. Perspektif ini digunakan untuk memahami bahwa pengalaman perempuan dalam pengelolaan sampah dibentuk oleh persilangan gender, kelas sosial, dan jenis pekerjaan, sehingga kerja perawatan perempuan dinormalisasi dan tidak diakui dalam sistem pengelolaan sampah. Subjek penelitian adalah tiga orang perempuan yang memiliki pengalaman langsung dalam kerja pengelolaan sampah, baik di ranah domestik maupun sektor informal. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data. Penelitian dilakukan di wilayah urban Kota Surabaya, yang dipilih karena memiliki sistem pengelolaan sampah terintegrasi dan dinamika lingkungan perkotaan yang kuat.

Pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, mengingat penelitian ini menyangkut pengalaman yang tidak selalu terlihat dan mudah diakses. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang meliputi proses reduksi data, pengelompokan tema, serta interpretasi data dengan mengaitkan temuan empiris pada teori feminisme interseksional.

## **Hasil dan Pembahasan**

Praktik pengelolaan sampah dalam konteks perkotaan sering kali dipresentasikan sebagai solusi teknis atas persoalan lingkungan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian feminis dan keadilan lingkungan, praktik ini tidak pernah netral secara sosial. Pengelolaan sampah justru menjadi arena di mana relasi kuasa, ketimpangan gender, dan kerja perawatan perempuan

direproduksi secara sistematis. Dengan menggunakan perspektif feminisme interseksional dan pendekatan fenomenologi, bagian ini membahas bagaimana pengalaman hidup perempuan memperlihatkan pengelolaan sampah sebagai bentuk industri ekstraktif non-material.

#### **4.1. Feminisme Interseksional dan Normalisasi Kerja Perawatan Perempuan**

Dalam konteks pengelolaan sampah, perempuan berada pada posisi yang rentan karena berbagai faktor struktural yang menempatkan kerja perawatan sebagai tanggung jawab yang dilekatkan secara sosial kepada perempuan. Kerja perawatan, seperti memilah sampah rumah tangga, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengelola dampak kesehatan akibat limbah, sering kali dipandang sebagai kewajiban alamiah perempuan, bukan sebagai kerja yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Morrow dan Dombroski (2021) menegaskan bahwa kerja perawatan merupakan fondasi dari keberlangsungan sistem sosial, namun secara sistematis dikeluarkan dari kategori kerja produktif dan tidak memperoleh pengakuan yang setara. Kondisi ini membuat perempuan sangat rentan terhadap eksploitasi kerja yang berlangsung secara halus dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh persilangan antara gender dan kelas sosial. Perempuan dari kelas ekonomi menengah ke bawah memiliki ruang tawar yang lebih terbatas dalam membagi atau menolak beban kerja perawatan. Weeks (2021) menjelaskan bahwa sistem ekonomi modern sangat bergantung pada kerja yang tidak dibayar, yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, sehingga kerja perawatan menjadi bagian dari mekanisme ekstraksi yang tidak terlihat. Dalam konteks pengelolaan sampah, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola limbah domestik, tetapi juga sebagai penyangga utama keberhasilan sistem kebersihan lingkungan, tanpa dukungan dan perlindungan yang memadai.

Temuan lapangan memperlihatkan bagaimana normalisasi ini bekerja dalam pengalaman hidup perempuan. Salah satu informan menyatakan:

*“Urusan sampah itu sudah dari dulu tugas perempuan. Kalau tidak dikerjakan, nanti dianggap tidak bisa mengurus rumah.”* (AN)

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana kerja perawatan dilegitimasi melalui norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga kebersihan dan kesehatan keluarga. Dalam perspektif feminisme interseksional, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari persilangan antara identitas gender, posisi kelas, dan struktur rumah tangga yang membatasi pilihan perempuan.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah cenderung bersifat *gender-blind*. Nightingale (2020) dan Agarwal (2022) menegaskan bahwa kebijakan lingkungan jarang mempertimbangkan pengalaman perempuan, meskipun perempuan merupakan aktor utama dalam praktik pengelolaan sehari-hari. Ketika kerja perawatan tidak diakui sebagai kerja, maka risiko kesehatan, kelelahan fisik, dan beban psikologis yang dialami perempuan juga tidak dianggap sebagai persoalan struktural, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi.

Dalam kerangka feminisme interseksional, eksploitasi kerja perawatan perempuan bukan sekadar akibat dari kebiasaan sosial, tetapi merupakan manifestasi dari struktur sosial yang berlapis. Perempuan mengalami penindasan tidak hanya karena gender, tetapi juga karena posisi kelas dan status kerja informal yang melekat pada mereka. Kerja perawatan menjadi lokasi utama terjadinya ekstraksi non-material, di mana waktu, tenaga, dan tubuh perempuan dimanfaatkan untuk menopang sistem pengelolaan sampah yang diproduksi sebagai solusi lingkungan.

Dengan demikian, feminisme interseksional membantu mengungkap bahwa normalisasi kerja perawatan perempuan dalam pengelolaan sampah bukanlah fenomena individual, melainkan hasil dari relasi kuasa dan struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Perspektif ini menegaskan bahwa upaya memahami pengelolaan sampah sebagai industri ekstraktif harus dimulai dengan membongkar bagaimana kerja perawatan perempuan dinaturalisasi, tidak diakui, dan dieksploitasi dalam sistem sosial yang lebih luas.

#### 4.2. Pengelolaan Sampah sebagai Praktik Ekstraksi Non-Material

Dalam konteks perkotaan saat ini, pengelolaan sampah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem pengelolaan sampah modern sering dipresentasikan sebagai solusi lingkungan yang rasional dan berkelanjutan. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat praktik eksploitasi yang bekerja secara tidak kasat mata, terutama terhadap perempuan. Perempuan berada pada posisi yang rentan karena pengelolaan sampah sangat bergantung pada kerja perawatan yang dilekatkan secara sosial kepada mereka. Kerja ini mencakup pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah, hingga menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan keluarga, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa pengakuan sebagai kerja produktif.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sektor lingkungan dan pengelolaan limbah sangat bergantung pada kerja perempuan, terutama dalam bentuk kerja informal dan domestik. Samson (2021) menegaskan bahwa perempuan mendominasi kerja-kerja pengelolaan sampah yang tidak terlindungi, dengan risiko kesehatan yang tinggi dan minim perlindungan sosial. Fredericks (2021) juga menunjukkan bahwa kerja pengelolaan sampah sering dipersepsikan sebagai kerja rendahan, sehingga mudah dinaturalisasi dan tidak dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak dipahami sebagai subjek dengan hak dan kebutuhan, melainkan sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan sistem kebersihan dan lingkungan.

Praktik pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan bagaimana kerja perempuan dieksploitasi melalui mekanisme yang halus. Perempuan dituntut untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, sementara kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut sering berujung pada stigma sosial. Salah satu informan mengungkapkan pengalamannya:

*"Kalau lingkungan kotor, yang disalahkan itu ibu-ibu. Padahal sampahnya bukan cuma dari kami, tapi tetap kami yang harus bereskan."* Wawancara dengan (DN)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas persoalan lingkungan, meskipun kontrol atas sistem pengelolaan sampah secara struktural berada di luar jangkauan mereka. Dalam perspektif feminisme interseksional, kondisi ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi perempuan dibentuk oleh persilangan antara gender dan posisi sosial, di mana perempuan dari kelas sosial bawah menanggung beban yang lebih berat.

Eksploitasi ini semakin diperkuat oleh struktur kebijakan yang bersifat *gender-blind*. Nightingale (2020) dan Agarwal (2022) menegaskan bahwa kebijakan lingkungan jarang mempertimbangkan pengalaman dan beban kerja perempuan. Akibatnya, sistem pengelolaan sampah bergantung pada kerja perempuan tanpa menyediakan dukungan, fasilitas, atau perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai industri ekstraktif non-material, di mana yang diekstraksi bukan hanya limbah, tetapi juga waktu, tenaga, dan kesehatan perempuan.

Pengalaman informan juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah bukan sepenuhnya pilihan bebas, melainkan hasil dari kondisi struktural yang membatasi opsi mereka. Tekanan ekonomi, norma sosial, dan tuntutan moral membuat perempuan sulit menolak kerja perawatan tersebut. Seorang informan menyampaikan:

*"Sebenarnya capek, tapi kalau tidak dikerjakan, nanti dibilang tidak peduli lingkungan. Jadi mau tidak mau harus dijalani."* Wawancara dengan (LM)

Kesaksian ini menunjukkan bahwa eksploitasi perempuan dalam pengelolaan sampah berlangsung melalui mekanisme normalisasi dan tekanan sosial, bukan melalui paksaan langsung. Dalam perspektif feminisme interseksional, kondisi ini menegaskan bahwa eksploitasi perempuan tidak dapat dipahami sebagai keputusan individual semata, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang berlapis.

Dengan demikian, pengelolaan sampah sebagai bentuk eksploitasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis atau lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender

yang tertanam dalam sistem sosial. Feminisme interseksional menolak pandangan bahwa perempuan secara bebas memilih menanggung beban kerja tersebut, dan sebaliknya menempatkan eksploitasi kerja perawatan sebagai konsekuensi dari relasi kuasa dan struktur sosial yang tidak setara. Perspektif ini menegaskan bahwa upaya mengatasi persoalan pengelolaan sampah harus disertai dengan perubahan struktural yang mengakui, melindungi, dan mendistribusikan kerja perawatan secara lebih adil.

#### **4.3. Relasi Kuasa, Kebijakan Lingkungan, dan Invisibilitas Gender**

Praktik pengelolaan sampah dalam konteks perkotaan menciptakan relasi kuasa yang tidak setara antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Ketimpangan ini muncul karena pembagian peran yang timpang, di mana perempuan ditempatkan sebagai pelaksana kerja perawatan, sementara pengambilan keputusan dan kontrol atas sistem pengelolaan sampah berada di tangan aktor lain, seperti negara, aparat lokal, atau pengelola lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial dan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat dalam sistem kerja yang menuntut fleksibilitas dan kepatuhan tinggi. Sulastri dan Rochmansyah (2024) menegaskan bahwa perempuan kerap dipaksa bertahan dalam kondisi kerja yang timpang akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan. Dalam konteks pengelolaan sampah, perempuan menjalankan kerja-kerja rutin seperti memilah, membersihkan, dan mengelola limbah, sementara kontrol atas fasilitas, aturan, dan kebijakan berada di luar jangkauan mereka. Relasi ini membentuk hierarki yang jelas, di mana perempuan berada pada posisi bawah dalam struktur pengelolaan lingkungan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa perempuan memiliki sedikit ruang untuk menentukan cara kerja atau menyampaikan keberatan terhadap kondisi yang mereka alami. Salah satu informan menyatakan:

*"Kami hanya menjalankan. Soal tempat sampah, jadwal, atau aturan, semua sudah ditentukan. Kalau tidak ikut, nanti dianggap tidak peduli lingkungan."* Wawancara dengan (SR)

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus patuh terhadap sistem, tanpa memiliki kuasa untuk menegosiasikan peran atau beban kerja. Dalam perspektif feminisme interseksional, ketimpangan ini tidak hanya dibentuk oleh gender, tetapi juga oleh posisi kelas dan status kerja informal yang membuat perempuan semakin bergantung pada struktur yang ada.

Relasi kuasa yang timpang juga terlihat dari distribusi tanggung jawab dan konsekuensi. Ketika sistem pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, perempuan sering menjadi pihak yang disalahkan secara sosial. Sebaliknya, aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih besar jarang menghadapi konsekuensi langsung atas kegagalan sistem. Kondisi ini memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral, tetapi tidak memiliki kontrol struktural. Lintang et al. (2024) menunjukkan bahwa ketergantungan perempuan dalam struktur kerja yang timpang sering kali membuat mereka dipersepsikan tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam konteks ini, relasi kuasa dalam pengelolaan sampah dapat dibaca sebagai bentuk dominasi struktural yang berlangsung secara halus. Perempuan ditempatkan sebagai pelaksana kerja perawatan yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem, sementara suara dan pengalaman mereka tidak diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Feminisme interseksional menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan hasil ketidakmampuan individu perempuan, melainkan konsekuensi dari struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi subordinat melalui persilangan gender, kelas, dan kebijakan lingkungan.

Dengan demikian, relasi kuasa yang tidak setara dalam pengelolaan sampah memperlihatkan bagaimana industri ekstraktif non-material bekerja melalui hierarki sosial yang menguntungkan

aktor tertentu dan merugikan perempuan. Selama perempuan hanya diposisikan sebagai pelaksana tanpa kuasa, pengelolaan sampah akan terus mereproduksi ketimpangan gender dan mempertahankan struktur eksploitasi yang tersembunyi di balik wacana kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

#### **4.4. Dampak Sosial dan Psikologis bagi Perempuan**

Keterlibatan perempuan dalam praktik pengelolaan sampah sebagai bagian dari kerja perawatan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Beban kerja yang terus-menerus, paparan risiko lingkungan, serta tuntutan moral untuk selalu menjaga kebersihan menciptakan tekanan emosional yang sering kali tidak disadari sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam banyak kasus, perempuan menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “wajar”, meskipun secara perlahan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kerja lingkungan yang tidak diakui dan tidak terlindungi berkontribusi pada kelelahan emosional, rasa bersalah, dan tekanan psikologis pada perempuan. Samson (2021) menegaskan bahwa pekerja perempuan di sektor sampah kerap mengalami beban berlapis, di mana tuntutan kerja tidak sebanding dengan pengakuan sosial yang mereka terima. Fredericks (2021) juga menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kerja pengelolaan limbah sering kali menghadapi tekanan psikologis akibat stigma terhadap kerja “kotor” dan rendahnya penghargaan sosial.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa perempuan merasakan tekanan psikologis ketika kebersihan lingkungan tidak sesuai dengan standar sosial yang dilekatkan kepada mereka. Salah satu informan mengungkapkan:

*“Kalau lingkungan terlihat kotor, rasanya seperti saya yang gagal. Padahal sudah capek beresin, tapi tetap saja merasa bersalah.”* Wawancara dengan (DN)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab moral atas kebersihan lingkungan dilekatkan secara personal kepada perempuan, sehingga kegagalan struktural dialami sebagai beban individu. Dalam perspektif feminisme interseksional, kondisi ini memperlihatkan bagaimana tekanan psikologis dibentuk oleh persilangan antara gender dan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai penjaga utama kebersihan dan kesehatan keluarga.

Selain dampak psikologis, perempuan juga menghadapi dampak sosial berupa stigma dan penilaian negatif. Dalam konteks pengelolaan sampah, perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan ketika lingkungan dianggap tidak bersih, meskipun keterbatasan fasilitas dan kebijakan berada di luar kendali mereka. Stigma ini tidak hanya muncul dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga memengaruhi relasi sosial perempuan dengan tetangga dan komunitas sekitar. Seorang informan menyampaikan:

*“Kalau sampah menumpuk, omongannya ke ibu-ibu. Padahal fasilitasnya juga kurang, tapi tetap kami yang kena.”* Wawancara dengan (LM)

Dampak sosial dari pengelolaan sampah sebagai industri ekstraktif dirasakan kuat oleh perempuan, terutama melalui stigma dan tekanan moral yang dilekatkan pada mereka sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Stigma ini tidak hanya memengaruhi relasi sosial sehari-hari, tetapi juga menimbulkan beban psikologis berupa rasa bersalah, kelelahan emosional, dan menurunnya rasa percaya diri. Banyak perempuan berusaha bertahan dalam kondisi tersebut, namun dampaknya tidak selalu mudah dipulihkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mengekstraksi sumber daya material, tetapi juga mengekstraksi kerja perawatan dan kesejahteraan sosial perempuan.

Selama kerja perawatan terus dinormalisasi dan tidak diakui, ketimpangan gender akan tetap direproduksi dalam sistem pengelolaan lingkungan.

## **Simpulan dan Saran**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan praktik yang tidak netral gender dan beroperasi dalam kerangka industri ekstraktif yang mereproduksi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diposisikan sebagai aktor utama dalam kerja pengelolaan sampah sehari-hari, namun kontribusi mereka dinormalisasi sebagai tanggung jawab domestik, tidak diakui secara sosial maupun struktural, serta tidak disertai dengan perlindungan dan pengakuan yang setara. Dalam perspektif feminisme interseksional, keterlibatan perempuan dalam kerja pengelolaan sampah bukan merupakan pilihan yang sepenuhnya otonom, melainkan dibentuk oleh kondisi struktural seperti norma gender, tekanan sosial, dan posisi kelas yang membatasi ruang tawar mereka. Sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat gender-blind memperkuat invisibilitas kerja perawatan perempuan dan memindahkan beban sosial serta risiko ekologis ke tubuh dan kehidupan perempuan. Ketimpangan ini berdampak pada kondisi psikologis dan sosial perempuan, seperti kelelahan emosional, rasa bersalah, dan stigma sosial, yang pada akhirnya membatasi kesejahteraan serta ruang sosial mereka di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan menuntut perubahan struktural yang mengakui kerja perawatan perempuan dan mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam kebijakan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perspektif keadilan gender dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sampah melalui pengakuan formal terhadap kerja perawatan perempuan, penyediaan perlindungan sosial, serta pelibatan perempuan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Secara praktis, program pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu dirancang secara partisipatif dan adil gender dengan mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan secara lebih setara serta menyediakan dukungan edukatif dan fasilitas yang tidak membebani perempuan secara tidak proporsional. Dari sisi pengembangan teori, kajian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan perlu mengadopsi kerangka feminisme interseksional untuk mengungkap relasi kuasa dan dampak ekologis yang dialami perempuan dari latar sosial yang beragam. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali secara komparatif pengalaman perempuan dalam pengelolaan sampah di berbagai konteks wilayah, kelas sosial, dan kebijakan lokal, guna memperkuat formulasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan gender dan berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- Agarwal, B. (2022). *Gender and green governance: The political economy of women's presence within and beyond community forestry*. Oxford University Press.
- Borras, S. M., Franco, J. C., Isakson, S. R., Levidow, L., & Vervest, P. (2020). The rise of flex crops and commodities: Implications for research. *Journal of Peasant Studies*, 43(1), 93–115. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1036417>
- Crenshaw, K. (2021). On intersectionality: Essential writings. *The New Press*.
- Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., & Ekowati, D. (2022). Gender and generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia. *Geoforum*, 134, 180–190. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.05.004>
- Fredericks, R. (2021). Garbage citizenship: Vital infrastructures of labor in Dakar, Senegal. *Duke University Press*.
- Galtung, J. (2020). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 57(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/0022343319898659>

- Gill, K., & Elias, J. (2021). Gendered labour and environmental harm in global production networks. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(7), 1414–1431. <https://doi.org/10.1177/0308518X211003412>
- Jenkins, K. (2020). Women, mining and development: An emerging research agenda. *The Extractive Industries and Society*, 7(2), 471–475. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.003>
- Kabeer, N. (2020). *Gender, poverty, and inequality: A brief history of feminist contributions*. Routledge.
- Lahiri-Dutt, K. (2022). Gendering extraction: Critical feminist engagements with mining. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101020. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101020>
- MacKinnon, C. A. (2020). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Mohai, P., Pellow, D., & Roberts, J. T. (2021). Environmental justice. *Annual Review of Environment and Resources*, 46, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012420-013138>
- Morrow, O., & Dombroski, K. (2021). Food, care, and gendered labour. *Progress in Human Geography*, 45(2), 339–357. <https://doi.org/10.1177/0309132519899450>
- Nelles, J., & Satterthwaite, D. (2020). Gendered vulnerabilities in urban environmental governance. *Environment and Urbanization*, 32(2), 391–408. <https://doi.org/10.1177/0956247820920047>
- Nightingale, A. J. (2020). Environment and gender. *Progress in Human Geography*, 44(4), 769–776. <https://doi.org/10.1177/0309132519889757>
- Pellow, D. (2020). *What is critical environmental justice?* Polity Press.
- Samson, M. (2021). Gendering waste work: Informality, power and inequality. *Antipode*, 53(5), 1404–1424. <https://doi.org/10.1111/anti.12724>
- Siscawati, M., & Mahaningtyas, A. (2022). Women defending land and life: Gendered resistance to extractivism in Indonesia. *Feminist Review*, 131(1), 60–76. <https://doi.org/10.1177/01417789221086534>
- UN Environment Programme. (2021). *Gender and waste management: Policy and practice*. United Nations Environment Programme.
- Weeks, K. (2021). *The problem with work: Feminism, Marxism, antiwork politics, and postwork imaginaries*. Duke University Press.